

# EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI OLEH PEMERINTAH DESA BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS

Dewi Febriana

Universitas Galuh Ciamis  
E-mail : febrianad027@gmail.com

## ABSTRAK

*Hasil observasi diketahui bahwa evaluasi program bantuan langsung tunai oleh pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini terlihat dari ketidaktepatan penerima manfaat, karena masih ada beberapa masyarakat yang kurang layak malah mendapatkan program Bantuan Langsung Tunai, kurang efektifnya penyaluran program Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat penerima manfaat, hal ini terlihat dari waktu penyaluran selalu berubah-ubah dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, masih adanya ketidaksinkronan data antara pemerintah desa dan Dinas Sosial sehingga masih adanya tumpang tindih data terhadap masyarakat penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi program bantuan langsung tunai oleh pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang evaluasi program bantuan langsung tunai oleh pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pendapat Tayibnapis (2008: 5), yaitu pemerintah desa sudah melakukan verifikasi secara langsung kelapangan agar dapat mengetahui secara jelas kesesuaian antara data yang ada dengan fakta di lapangan, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat di desa serta melakukan koordinasi dengan lembaga desa, organisasi kemasyarakatan di desa serta tokoh masyarakat serta pemerintah desa sudah melakukan pemuktahiran data agar tidak adanya data ganda.*

**Kata Kunci :** *Evaluasi, Program, Program Bantuan Langsung Tunai.*

## PENDAHULUAN

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program kebijakan nasional di bidang jaminan sosial yang dikeluarkan oleh

pemerintah pusat yang dilatarbelakangi oleh adanya situasi dan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin terpuruk sehingga tidak

memungkinkan bagi sebagian masyarakat yang berkekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bukti adanya perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di bidang ekonomi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Program Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan sesuai dengan 'Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005', tentang "Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin di Indonesia". Dengan mengacu terhadap dasar hukum pelaksanaan program BLT yaitu melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk rumah tangga sasaran. Kebijakan program jaminan perlindungan sosial yang salah satunya adalah program Bantuan Langsung Tunai sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 tepatnya pada bulan Oktober, sebagai program jaminan sosial terhadap masyarakat yang diakibatkan dari adanya kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat. Mekanisme penyaluran program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan program perlindungan sosial terhadap masyarakat yang ditujukan untuk membantu kesulitan terhadap perekonomian dari masyarakat yang berkekurangan dari segi ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan kesehariannya sehingga dapat menjaga

dan mencegah tingkat kesejahteraan hidup dari masyarakat dari krisis perekonomiannya.

Salah satu program kebijakan jaring pengaman sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat adalah program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yang merupakan salah satu program jaring pengaman sosial yang mengambil sumber dana dari dana desa, dimana alokasi dana desa dapat digunakan secara langsung untuk melaksanakan program Bantuan Langsung Tunai di desa dengan mengacu terhadap berbagai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan diutamakan penyalurannya dapat diberikan terhadap masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19, seperti terhadap masyarakat pekerja atau buruh dari berbagai perusahaan yang terkena PHK karena adanya pengurangan karyawan secara massal, dan masyarakat seperti ini merupakan masyarakat yang rentan untuk memenuhi kebutuhan pokok kesehariannya, sehingga dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai sebagai program jaring pengaman sosial dapat membantu meringankan dan menanggulangi kesulitan ekonomi dari masyarakat di tingkat desa.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa,

tentang perubahan Peraturan Menteri Desa (PD TT) Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa.

Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa PD TT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 Pasa 8A ayat 3 kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai diantaranya adalah “Keluarga miskin sebagai penerima BLT-Dana Desa yang merupakan keluarga yang kehilangan pekerjaan tetapnya atau mata pencahariannya dan belum terdata sebagai penerima program sosial lainnya, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Kabupaten serta memiliki keluarga yang terkena sakit keras”

Berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai persyaratan keluarga penerima manfaat yang sudah disebutkan di atas bahwa yang berhak sebagai penerima program BLT-Dana Desa ini adalah masyarakat yang tingkat ekonominya kurang mampu.

Dalam penyaluran program Bantuan langsung Tunan Dana Desa masih menyisakan berbagai permasalahan dan hal itu tidak ahanya di satu daerah saja tetapi hampir di berbagai daerah terhjadi pemasalahan yang sama, seperti dalam penyaluran

program Bantuan Langsung Tunai di desa masih terjadi keterlambatan pencairan sehingga adanya ketidakpuasan dari masyarakat penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di desa, hal ini menyebabkan masyarakat mendatangi kantor desa untuk mengetahui penyebab keterlambatan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa, banyaknya masyarakat desa yang terdampak menyebabkan anggaran Dana Desa kurang mencukupi untuk menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai di desa sehingga adanya keterlabatan dalam melakukan penyaluran, selain itu dalam hal pendataan masih adanya beberapa masyarakat yang dianggap layak tetapi tidak terdata sebagai penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di desa sehingga menimbulkan kecemburuan sosail, serta adanya keterbatan pengetahuan dan pemahaman dari perangkat desa mengenai mekanisme untuk penyaluran program Bnatuan Lansung Tunai di desa.

Masyarakat penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di desa di desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari terdapat di 3 (tiga) dusun yang telah di data oleh Rt/Rw setempat yang kemudian nantinya akan dilakukan verifikasi data dan dilaporkan terhadap kepala dusun untuk nantinya di bahas dalam musyawarah desa bersama dengan keapala desa untuk menentukan masyarakat penerima manfaat program

Bantuan Langsung Tunai di desa yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah, baik melalui PKH, BPNT, KKS, BPS maupun bantuan sosial lainnya, “Kriteria” tersebut ditetapkan agar KPM tidak menerima bantuan ganda yang bersumber dari bantuan pemerintah, sehingga bisa terjadi pemerataan dalam penyaluran bantuan tersebut.

Berdasarkan informasi dan data dari Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp.600.000/KK ini dibagikan ke 144 KK yang tersebar di 3 (tiga) dusun yang ada di wilayah desa Banjarsari, yang terdiri dari, Dusun Banjarsari 42 KK, Dusun Neglasari 68 KK, Dusun Sukamaju 34 KK. Namun pada pelaksanaannya masih ada permasalahan dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai, hal ini dikarenakan masih adanya tumpang tindih data masyarakat penerima manfaat PKH, BPNT, KKS, BPS dan data masyarakat penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai, masih adanya masyarakat yang dianggap layak menerima Bantuan Langsung Tunai tetapi tidak mendapatkannya, serta masih adanya keterlambatan dalam pencairan BLT Dana Desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Yunanda (2009:109) menyatakan bahwa : “Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana

untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”.

Selanjutnya Wirawan (2011:9) menyatakan bahwa :

Evaluasi pada dasarnya adalah melakukan penilaian kualitas (*merit*) mengenai baik buruknya atau tinggi rendahnya kualitas program yang dievaluasi, dan penilaian manfaat (*worth*), bermanfaat tinggi atau rendahnya program, dalam kaitan dengan suatu tujuan atau standar tertentu.

Dengan demikian bahwa evaluasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh pelaksana untuk mengetahui ketepatan dan kebaikan dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Adapun Ahmad (2007: 133), mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dan lain-lain) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”

Menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah : “Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.”

Dari uraian di atas bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk

mengumpulkan data dari pelaksanaan suatu program agar dapat di bandingkan dengan perencanaan yang telah di tetapkan sehingga pelaksanaan program dapat dilaksanakan secara efektif.

Sebuah program adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan waktu pelaksanaan yang panjang. Selain itu, sebuah program tidak hanya terdiri dari suatu kegiatan namun, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu sama lain dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya.

Menurut Arikunto (2009: 297) evaluasi program merupakan :

Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program ialah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut Jabar (2009: 5) evaluasi program merupakan :  
“Proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasi”.

Adapun menurut Wirawan (2016: 25) bahwa “evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi hasilnya untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program”.

Selanjutnya Widoyoko (2015: 33) evaluasi program merupakan :

Rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya, baik terhadap program yang sedang berjalan maupun program yang telah berlalu

Berdasarkan pendapat di atas bahwa evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan pengumpulan data atau informasi ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan program dimasa akan datang. Karenanya, dalam keberhasilan suatu evaluasi program ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas adalah perbandingan antara output dan input sedangkan efisiensi merupakan taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output melalui suatu proses.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa (PDPT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa : “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT- Dana Desa adalah Bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana Desa”.

Menurut Sophan (2018: 68) Bantuan langsung tunai adalah “Program dari pemerintah akibat

dicabutnya subsidi BBM dan dialihkan kepada rakyat miskin agar di Indonesia berkurang, dengan adanya BLT ini diharapkan kemakmuran penduduk semakin merata”.

Sedangkan menurut Anggara (2014: 35) Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa adalah : “Salah satu kebijakan pemerintah guna melawan berbagai dampak pandemi Covid-19”.

Dari uraian di atas bahwa program Bantuan Langsung Tunai diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian dapat diartikan sebagai rencana, struktur dan strategi. Sebagai rencana dan struktur, desain penelitian merupakan perencanaan penelitian yaitu penjelasan secara rinci tentang keseluruhan rencana penelitian mulai dari perumusan masalah, tujuan, gambaran hubungan antar variabel, perumusan hipotesis sampai rancangan analisis data, yang dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk usulan atau proposal penelitian. Sebagai strategi, desain penelitian merupakan penjelasan rinci tentang apa yang akan dilakukan peneliti dalam rangka pelaksanaan penelitian.

Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2016: 6) bahwa : Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, menurut Arikunto (2013: 3) mengemukakan bahwa :

Penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Dalam penelitian deskriptif fenomena ada yang berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya

Selanjutnya Danim, (2012:51), penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci mengenai keadaan obyek atau subyek amatan. Data yang diperoleh meliputi transkrip *interview* (wawancara), catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan lain-lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

- 1. Dimensi Konteks**
- a. Indikator, Pemerintah desa melakukan verifikasi data secara administrasi terhadap masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Langsung Tunai di desa;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pemerintah desa melakukan verifikasi data secara administrasi terhadap masyarakat yang berhak menerima program bantuan langsung tunai di desa, belum tepat, hal ini terlihat dari pemerintah desa dalam melakukan verifikasi data kelengkapan persyaratan dari masyarakat calon penerima program BLT tidak secara mendetail dan tidak secara langsung ke lapangan, pemerintah desa sudah mengintruksikan terhadap perangkat desa agar dapat melakukan verifikasi secara langsung, baik itu dari data yang ada maupun secara langsung ke lapangan agar dapat mengetahui kesesuaian data secara administrasi dengan fakta secara langsung di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam tahapan verifikasi data kelengkapan persyaratan dari masyarakat calon penerima program BLT terlihat belum tepat, dan hal ini dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang secara kriteria terlihat berhak sebagai masyarakat calon penerima manfaat program bantuan langsung tunai di desa tetapi tidak lolos verifikasi, hal ini di karenakan pemerintah desa kurang melakukan verifikasi secara langsung ke lapangan sehingga kurang mengetahui secara mendetail kesesuaian antara persyaratan secara administrasi dengan fakta dan kenyataan di lapangan sehingga masih ada beberapa masyarakat yang terlihat layak untuk mendapatkan program bantuan

langsung tunai tetapi tidak lolos verifikasi karena dianggap kurang lengkapnya persyaratan secara administrasi.

**b. Indikator, Pemerintah desa menentukan masyarakat calon penerima manfaat yang layak menerima program Bantuan Langsung Tunai di desa;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pemerintah desa menentukan masyarakat calon penerima manfaat yang layak menerima program Bantuan Langsung Tunai di desa, masih kurang tepat sasaran, hal ini di karenakan pelaksanaan musyawarah desa sebagai rangkaian dan tahapan dalam menentukan masyarakat calon penerima manfaat program bantuan langsung tunai di desa masih kurang adanya partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat di desa, oleh karena itu sudah memberikan saran dan masukan terhadap pemerintah desa agar dapat merangkul semua elemen masyarakat di desa, baik itu tokoh masyarakat di desa dan lembaga desa untuk menghadiri musyawarah desa dalam rangka menentukan masyarakat calon penerima program bantuan langsung tunai yang sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam menentukan masyarakat calon penerima manfaat bantuan langsung tunai di desa, pemerintah desa pemerintah desa masih kurang dilaksanakan secara optimal karena yang terlihat pemerintah desa

kurang mampu merangkul semua elemen masyarakat di desa dari mulai tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama serta lembaga di desa untuk menghadiri musyawarah desa untuk menentukan masyarakat yang berhak untuk menerima program bantuan langsung tunai desa yang sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan, oleh karena itu pemerintah desa harus lebih pro aktif untuk mengundang semua masyarakat di desa agar dapat menghadiri musyawarah desa untuk menentukan masyarakat calon penerima manfaat program bantuan langsung tunai.

## **2. Dimensi Input**

### **a. Indikator, Pemerintah desa membantu masalah yang dihadapi masyarakat calon penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di desa;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pemerintah desa membantu masalah yang dihadapi masyarakat calon penerima manfaat program Bantuan Langsung Tunai di desa, masih kurang optimal, hal ini terlihat dari kurangnya kesediaan pemerintah desa untuk mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan dan permasalahan secara cepat yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat program bantuan langsung tunai di desa, oleh karena itu pimpinan di desa sudah memberikan arahan terhadap aparat pemerintah desa agar membantu permasalahan mengenai adanya perbedaan data diantara KTP

dan KK yang di hadapi oleh masyarakat penerima manfaat program bantuan langsung tunai sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penyaluran program bantuan langsung tunai di desa.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat program bantuan langsung tunai, masih kurang optimal, hal ini dikarenakan masih kurangnya komitmen dari perangkat desa untuk mendengarkan dan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat penerima manfaat program bantuan langsung tunai di desa sehingga dapat menghambat terhadap pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa.

### **b. Indikator, Pemerintah desa menetapkan strategi untuk menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai di desa;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pemerintah desa menetapkan strategi untuk menyalurkan program Bantuan Langsung Tunai di desa, belum optimal, hal ini terlihat dari pemerintah desa masih kurang melakukan update data sehingga masih adanya data yang ganda, hal ini akan menghambat untuk mengetahui masyarakat yang sudah dan belum menerima bantuan sosial penerima program BLT di desa yang sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan sehingga dapat menimbulkan

kecurigaan terhadap pemerintah desa dalam menentukan masyarakat calon penerima program bantuan langsung tunai di desa, oleh karena itu pemerintah desa sudah melakukan update data sehingga tidak adanya data ganda masyarakat yang sudah menerima bantuan sosial yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan program BLT di desa, masih kurang optimal, hal ini terlihat dari pemerintah desa masih kurang melakukan pemuktahiran data masyarakat penerima program bantuan sosial sehingga belum mampu menyinkronkan data, sehingga masih ada beberapa data masyarakat yang ganda yang sudah menerima bantuan sosial tetapi masih tercatat sebagai penerima BLT di desa yang akhirnya direvisi kembali sehingga menghambat dalam penentuan masyarakat calon penerima bantuan langsung tunai di desa.

### **3. Dimensi, Proses implementasi**

#### **a. Indikator, Pemerintah desa melakukan sosialisasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat di desa;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang sosialisasi mengenai program Bantuan Langsung Tunai terhadap masyarakat di desa, sudah dilakukan walaupun kurang optimal, hal ini terlihat dengan sudah adanya pelaksanaan kegiatan sosialisasi

di kantor desa, walaupun memang baru dilakukan sekali dan belum semua masyarakat mengikutinya karena memang berbenturan dengan kegiatan kesehariannya, oleh karena itu pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi ke setiap dusun agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga dapat mengerti dan memahami secara jelas dan terperinci.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam sosialisasi sudah dilakukan di kantor desa tetapi memang belum dihadiri oleh semua lapisan masyarakat di desa sehingga masih perlu dilakukan lagi, hal ini terlihat dari masih banyak masyarakat di desa yang kurang mengetahui adanya program bantuan langsung tunai di desa, sehingga kurangnya informasi dari perangkat desa mengenai program bantuan langsung tunai secara menyeluruh ke semua lapisan masyarakat di desa.

#### **b. Indikator, Pemerintah desa melakukan komunikasi dengan Stakeholder desa dan masyarakat penerima manfaat untuk menyampaikan informasi mengenai penyaluran program Bantuan Langsung Tunai;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pemerintah desa melakukan komunikasi dengan Stakeholder desa dan masyarakat penerima manfaat untuk menyampaikan informasi mengenai penyaluran program Bantuan Langsung Tunai, masih kurang optimal, hal ini

terlihat dari pemerintah desa kurang melakukan koordinasi, baik itu dengan organisasi kemasyarakatan di desa atau dengan tokoh masyarakat desa maupun dengan lembaga desa, oleh karena itu sudah memberikan saran dan masukan terhadap perangkat desa agar melakukan koordinasi agar dapat melakukan pendekatan dan merangkul masyarakat desa untuk menyampaikan informasi mengenai program bantuan langsung tunai di desa.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan pemerintah desa masih kurang optimal dalam membangun komunikasi, hal ini terlihat dari perangkat desa terlihat kaku untuk membangun komunikasi dengan masyarakat di desa sehingga kurang mampu menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program bantuan langsung tunai terhadap masyarakat di desa, oleh karena itu sudah berusaha untuk melakukan koordinasi dengan semua elemen masyarakat di desa dan lembaga desa mengenai program bantuan langsung tunai di desa.

**c. Indikator, Adanya aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai aparatur pemerintah desa yang memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai, masih kurang optimal, hal ini ditunjukkan oleh

kurangnya kemampuan dalam melakukan pemuktahiran data secara online serta masih kurang wawasan terhadap aturan, mekanisme dan prosedur mengenai program bantuan langsung tunai di desa, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari aparatur perangkat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mempelajari dan memahami aturan, mekanisme, tahapan serta regulasi terbaru mengenai program bantuan langsung tunai di desa.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa kompetensi perangkat desa dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai masih kurang optimal, hal ini terlihat dari masih kurangnya pemahaman dan wawasan dalam pelaksanaan di lapangan dan selama ini hanya mengandalkan pengalaman saja, oleh karena itu perangkat itu sudah memberikan arahan agar aparatur perangkat desa dapat terus mempelajari dan memahami aturan, mekanisme, tahapan serta regulasi terbaru mengenai program bantuan langsung tunai di desa sehingga dapat melaksanakan program bantuan langsung tunai di desa secara optimal.

**d. Indikator, Adanya SOP yang jelas sebagai pedoman dalam melakukan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan mengenai SOP yang jelas sebagai pedoman dalam melakukan penyaluran program

Bantuan Langsung Tunai, masih kurang dilakukan secara optimal, karena dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa masih ada beberapa perangkat desa yang belum memahami secara jelas dan terperinci mengenai SOP sehingga dapat menghambat dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa, oleh karena itu perangkat desa harus di dasari dengan pemahaman mengenai SOP yang jelas karena memang SOP sebagai panduan dan petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai di desa sehingga perangkat desa dituntut untuk dapat mempelajari dan memahami SOP, aturan, mekanisme, tahapan serta regulasi terbaru mengenai program bantuan langsung tunai di desa.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa SOP dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai di desa masih kurang dipahami secara optimal, hal ini dikarenakan perangkat desa kurang di berikan arahan dan pemahaman mengenai SOP secara jelas dan terperinci sehingga akan menghambat dalam pelaksanaan dilapangan.

#### **4. Dimensi, Produk**

**a. Indikator, Program Bantuan Langsung Tunai di desa dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai program bantuan langsung tunai di desa dapat

meningkatkan daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sudah optimal, bahwa dengan adanya program bantuan langsung tunai di desa dapat meningkatkan daya beli masyarakat, minimal untuk membeli keperluan bahan pokok walaupun tidak secara lengkap, namun memang masih adanya masyarakat yang menjadi konsumtif dan kurang tepat dalam membelanjakan uang dari program bantuan langsung tunai di desa, oleh karena itu pemerintah desa melakukan pendekatan untuk memberikan arahan agar dapat membelanjakan uang dari program bantuan langsung tunai secara bijak untuk keperluan bahan pokok sehari-hari.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa dalam penyaluran program bantuan langsung tunai di desa memang sudah dikatakan tepat sehingga dapat membantu masalah perekonomian masyarakat di desa sehingga dapat membeli keperluan bahan pokok yang di sangat dibutuhkan, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat agar dapat bijak dan tidak konsumtif dalam membelanjakan uang dari program bantuan langsung tunai di desa.

**b. Indikator, Program Bantuan Langsung Tunai dapat memenuhi standar kebutuhan masyarakat penerima manfaat;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai program bantuan langsung tunai di desa dapat memenuhi standar kebutuhan masyarakat penerima manfaat, sudah

optimal, bahwa penyaluran program bantuan langsung tunai di desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat penerima manfaat di desa karena memang dapat memenuhi standar kebutuhan masyarakat penerima manfaat di rumahnya, seperti kebutuhan primer berupa kebutuhan pangan di keluarga, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat penerima manfaat program bantuan langsung tunai untuk bijak dalam membelanjakan uang BLT yang sesuai dengan kebutuhan pokok keseharian dalam rumah tangganya.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa program bantuan langsung tunai sangat membantu terhadap masyarakat penerima manfaat di desa untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan standar kebutuhan dalam rumah tangga, sudah optimal, walaupun memang masih ada beberapa masyarakat yang kurang bijak dan kurang memiliki kesadaran dengan cara konsumtif dan membelanjakan uangnya tidak tepat sasaran, oleh karena itu pemerintah desa berusaha memberikan pemahaman agar uang dari program BLT di desa diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat.

**c. Indikator, Program Bantuan Langsung Tunai di desa memberikan manfaat secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat penerima manfaat;**

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan mengenai

program bantuan langsung tunai di desa memberikan manfaat terhadap masyarakat penerima manfaat, sudah optimal, bahwa penyaluran program bantuan langsung tunai walaupun merupakan program jangka pendek tetapi memang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, walaupun tidak secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat penerima manfaat di desa, namun program itu membawa manfaat yang sangat signifikan untuk masyarakat penerima manfaat di desa, oleh karena itu penggunaan harus dilakukan secara bijak sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa penyaluran program bantuan langsung tunai di desa dalam pelaksanaannya harus langsung menyentuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, karena memang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat, walaupun masih ada penggunaan program bantuan langsung tunai yang disalahgunakan dalam penggunaannya sehingga terlihat kurang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang sesuai dengan standar kebutuhannya, oleh karena itu perlu adanya kesadaran dan arahan terhadap masyarakat agar dapat mengutamakan untuk membelanjakan uang BLT untuk keperluan memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan primer berupa pangan yang akan sangat bermanfaat bagi keluarga masyarakat penerima manfaat di desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad D. Marimba, 2007, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta; Bumi. Aksara.
- Moleong, Lexy. J. 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja*. Rosdakarya: Bandung.
- Sahya, Anggara. 2014. “*Kebijakan Publik*” Bandung : CV Pustaka Setia.
- Suharsimi, Arikunto. 2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widoyoko, E. 2015. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wirawan 2016. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Salemba Embat
- Yunanda. 2009. *Evaluasi Hasil Dan Proses Pembelajaran*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005’, tentang “Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin di indonesia
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program BLT untuk rumah tangga sasaran
- Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, tentang perubahan Peraturan Menteri Desa (PDTT) Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa diantaranya penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD).